

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nomor Pokok Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang berikutnya disebut dengan NPWP IP merupakan NPWP milik instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Penggunaan NPWP instansi pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 yang berikutnya dalam karya tulis ini akan disebut PMK 231 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Sebelumnya, identitas perpajakan instansi pemerintah melekat pada NPWP bendahara pemerintah. Namun setelah diterbitkannya SP-02/2020 yang merupakan tindak lanjut dari PMK 231, mulai 1 April 2020 NPWP bendahara pemerintah resmi dihapuskan secara jabatan dan dieskalasi menjadi NPWP instansi pemerintah. Hal yang melatarbelakangi diterapkannya NPWP instansi pemerintah ini di antaranya sebagai berikut.

- 1) Ketidaksesuaian *database master file* NPWP bendahara pemerintah dengan kondisi sebenarnya.
- 2) Kondisi pemenuhan kewajiban bendahara dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan yang belum sesuai dengan peraturan.
- 3) Kondisi pengawasan kepatuhan bendahara yang belum optimal.
- 4) Kondisi *existing* regulasi bendahara.

Melalui karya tulis yang berjudul “TINJAUAN EFEKTIVITAS NPWP INSTANSI PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI KPP PRATAMA BANYUWANGI” ini, penulis ingin mengetahui apakah penggunaan NPWP instansi pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang disebutkan sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melakukan pengamatan terhadap kondisi yang demikian, penulis hendak mencari kebenaran atas isu berikut.

- 1) Bagaimana kondisi *database Master File* Wajib Pajak (MFWP) bendahara pemerintah terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi sebelum dan sesudah diterapkannya NPWP instansi pemerintah?
- 2) Bagaimana kepatuhan pajak instansi pemerintah di KPP Pratama Banyuwangi sebelum dan sesudah penggunaan NPWP instansi pemerintah?
- 3) Apakah pemenuhan kewajiban wajib pajak instansi pemerintah di KPP Pratama Banyuwangi dalam membayar dan melaporkan pajak menjadi lebih baik setelah diterapkannya NPWP instansi pemerintah?

- 4) Bagaimana efektivitas penggunaan NPWP instansi pemerintah terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini yakni sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui kondisi *database* MFWP bendahara pemerintah terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi sebelum dan sesudah diterapkannya NPWP instansi pemerintah.
- 2) Untuk mengetahui kepatuhan pajak di KPP Pratama Banyuwangi sebelum dan sesudah penggunaan NPWP instansi pemerintah.
- 3) Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban wajib pajak instansi pemerintah terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi dalam membayar dan melaporkan pajak setelah diterapkannya NPWP instansi pemerintah.
- 4) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan NPWP instansi pemerintah terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Banyuwangi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini akan dibatasi sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada dengan berfokus pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019. Penulis melakukan tinjauan efektivitas NPWP instansi pemerintah terhadap kepatuhan pajak di daerah penulis dibesarkan, yakni Kabupaten Banyuwangi. Sumber data yang akan penulis peroleh berasal dari KPP Pratama Banyuwangi pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Di mana tahun 2019 mewakili tahun sebelum diterapkannya NPWP instansi pemerintah, tahun 2020 adalah tahun mulai diterapkannya NPWP instansi

pemerintah (tahun peralihan), dan tahun 2021 merupakan tahun efektif penggunaan NPWP instansi pemerintah. Data yang dimaksud meliputi data kepatuhan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (WPIP) dalam mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak.

Agar lebih akurat, penulis mengambil informasi dari sampel wajib pajak instansi pemerintah terdaftar di wilayah administrasi KPP Pratama Banyuwangi. Fokus pembahasan penulis adalah pada kesesuaian penerapan peraturan di lapangan dan efektivitas NPWP instansi pemerintah terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Banyuwangi.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap agar Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN EFEKTIVITAS NPWP INSTANSI PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI KPP PRATAMA BANYUWANGI” ini ke depannya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai efektivitas NPWP instansi pemerintah terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Banyuwangi, serta juga diharapkan sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Peneliti berharap melalui penulisan karya tulis yang memerlukan proses yang tidak sedikit ini dapat menambah wawasan penulis sehingga sanggup memberikan bermanfaat hingga ke tahap pengimplementasian.

b. Bagi KPP Pratama Banyuwangi

Penulis berharap melalui penulisan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Banyuwangi dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak instansi pemerintah.

c. Bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah (WPIP)

Penulis berharap melalui penulisan karya tulis ini dapat membantu WPIP dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Penulis berharap melalui penulisan karya tulis ini dapat membantu peneliti berikutnya dalam menyediakan rujukan literatur, terutama yang terkait dengan NPWP instansi pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis hendak menjelaskan gambaran umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori karya tulis ini akan memuat beberapa teori yang relevan dengan topik yang penulis ambil. Kumpulan teori dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan situs resmi yang kredibel akan membantu penulis dalam memecahkan rumusan masalah yang ada, sehingga tujuan penulisan karya tulis ini dapat tercapai.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis hendak menjabarkan hasil pembahasan atas topik yang diambil. Isinya memuat tentang kondisi *database* MFWP bendahara pemerintah, kepatuhan wajib pajak instansi pemerintah, pemenuhan kewajiban perpajakan WPPI, dan efektivitas NPWP instansi pemerintah di KPP Pratama Banyuwangi. Pembahasan didasarkan pada data yang telah terkumpul dari berbagai sumber yang relevan, valid, dan bersedia untuk dipublikasikan informasinya.

BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan merupakan bagian penutup dari karya tulis ini yang berisi tentang kesimpulan atas hasil tinjauan atau pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya terkait dengan efektivitas NPWP instansi pemerintah di KPP Pratama Banyuwangi.